



**PENGARUH UPAYA PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN  
AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENINGKATAN  
*INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION* DAN  
PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA PARTNER  
*UNITED STATE FREE TRADE AREA***

*Farisah Primarani Siswi*

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of IPP enforcement efforts undertaken by the United States in order to increase IPP level in United State's trading partner countries. In addition, this study provides an overview of the economic benefits to countries that enforce the IPP regime effectively. The method used in this study is quantitative method using software piracy as indicator to measure the strength of IPP in every partner countries. The results from this research indicates that the United States trade cooperation through US FTA scheme has significant effect towards the increase of IPP, compared with coercion through the Special report 301. The increase of IPP is evidenced by the decrease of software piracy level after US FTA ratification. This study also finds significant relationship between the increase of IPP level on the influx of foreign direct investment in the United States's trading partner countries, as a figure of economic benefit received by those countries for enforcing IPP regime under US FTA scheme.*

**Keywords:** *Intellectual Property Right, Intellectual Property Protection, software piracy, foreign direct investment*

**1. Pendahuluan**

Berangkat dari keuntungan dan pentingnya *Intellectual Property* bagi perekonomian, sejak tahun 2000, Amerika Serikat berupaya untuk lebih mengadvokasi isu terkait penegakan *Intellectual Property Protection* ([www.iipa.com](http://www.iipa.com), 2000). Upaya tersebut diwujudkan Amerika Serikat dalam bentuk kerjasama bilateral. Oleh karena itu setelah penandatanganan TRIPs, Amerika Serikat mengajukan sejumlah perjanjian perdagangan bilateral yaitu United State Free Trade Agreement (US FTA) dengan beberapa negara maju dan berkembang seperti : Australia, Bahrain, Jordan, Chili, Kolombia, Republik

Dominika, El Salvador, Honduras, Guatemala, Maroko, Nikaragua, Oman, Panama, Peru dan Singapura ([www.ustr.gov](http://www.ustr.gov)).

Melalui kerjasama perdagangan US FTA, Amerika Serikat berusaha meningkatkan standar IPP melalui TRIPs-Plus. Istilah TRIPs-Plus ini bermakna bahwa ketentuan mengenai IPP dalam perjanjian ini, mengalami peningkatan dari perjanjian TRIPs dalam ketentuan WTO (Turk, 2002 :987). Peningkatan standar IPP pada perjanjian TRIPs-Plus ini meliputi beberapa hal yaitu, menambah keikutsertaan dalam beberapa perjanjian dan konvensi internasional seperti *WIPO Copyright Treaty* (WCT), memperketat atau bahkan menghilangkan fleksibilitas-fleksibilitas yang terdapat pada perjanjian TRIPs, memperpanjang waktu perlindungan terhadap hak-hak terkait IPR dan meningkatkan penegakan perlindungan terhadap IP (Lindstrom, 2010).

Upaya Amerika Serikat untuk meningkatkan IPP tidak hanya dalam bentuk kerjasama, melainkan dengan cara lain yaitu memberikan tekanan pada negara-negara agar semakin meningkatkan IPP di negaranya. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk koersi melalui Section 301 yang merupakan bagian dari ketentuan Undang-Undang Perdagangan 1947 milik Amerika Serikat serta telah diimplementasikan sejak tahun 1989 ([www.iipa.com](http://www.iipa.com)). Ketentuan ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk mengidentifikasi negara-negara yang tidak memadai atau tidak secara efektif menegakan IPP.

Berdasarkan kategori-kategori dalam *Special 301 Report*, Amerika Serikat dapat menetapkan sanksi dagang bagi negara yang gagal memenuhi standar penegakan IPP (Simons, 1999: 15). Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan 1947 Amerika Serikat, negara yang dimasukkan kedalam *Priority Foreign Countries* setelah 30 hari akan ditinjau kembali, apakah akan dilakukan investigasi atau langsung menetapkan sanksi dagang (Sell, 2003: 125).

Meskipun upaya-upaya yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk meningkatkan IPP di berbagai negara dan mengurangi pelanggaran terhadap IPR, pada kenyataannya peningkatan IPP dapat berdampak negatif bagi negara-negara berkembang. Sebagai contoh, penerapan TRIPs-plus dapat membuat akses obat-obatan menjadi sulit (Castro, 2009: 14). Seperti yang terjadi pada kasus obat-obatan HIV/ AIDS di Republik Dominika. Ketentuan *compulsory licensing* yang diperketat menyebabkan meningkatnya biaya obat-obatan dan mengurangi peredaran obat-obatan generik. Padahal hampir 50% dari populasi penduduk di Republik Dominika hidup di bawah garis kemiskinan (Goergetown, 2010: 15). Hal ini tentu saja menyebabkan para penderita HIV/AIDS di Republik Dominika tidak mampu membeli obat-obatan dalam lingkungan hak paten. Sedangkan akses untuk mendapatkan obat-obatan murah semakin sulit akibat berkurangnya produksi obat-obatan generik. Kondisi yang demikian tentu saja dapat semakin memberatkan negara-negara berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upaya kerjasama Amerika Serikat melalui US FTA dan upaya koersi melalui *Special 301*, terhadap peningkatan IPP di negara-negara partner US FTA. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggambarkan keuntungan yang didapatkan negara-negara partner US FTA dalam menegakan rezim IPP yang kuat di negaranya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerjasama, koersi, dan keuntungan absolut dalam persepektif neoliberalisme. Teori kerjasama diharapkan dapat menjelaskan tercapainya suatu kepentingan negara dalam sebuah bentuk kerjasama. Sementara koersi dalam pandangan neoliberalisme, berusaha untuk menjelaskan peranan negara hegemon sebagai dalam menjaga kestabilan rezim melalui koersi. Teori keuntungan

absolut dan beberapa penelitian dari literatur sebelumnya, menjelaskan keikutsertaan negara dalam sebuah kerjasama untuk mencapai keuntungan yang absolut. Dalam hal ini, penelitian sebelumnya seperti Lesser (2002), Smarzynska (2004) Lippoldt (2006) dan Adams (2010) menemukan pengaruh penegakan rezim IPP yang kuat terhadap masuknya arus investasi asing.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel kerjasama dan koersi terhadap peningkatan IPP serta perekonomian negara-negara partner USFTA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu perpaduan dari data *crosssection* dan *time series*. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: tahun peratifikasian perjanjian US FTA sebagai indikator kerjasama, kategori negara dalam laporan *Special 301* sebagai indikator koersi, angka *software piracy* dan IPR indeks sebagai indikator penegakan IPP dan FDI *inflow* sebagai indikator arus investasi asing.

Pada analisis pengaruh antara kerjasama dan koersi terhadap IPP. Variabel kerjasama menggunakan indikator tahun peratifikasian USFTA. Sementara itu, variabel koersi menggunakan kategori negara dalam laporan *special 301*. Untuk variabel IPP, digunakan indikator angka *software piracy*. Dengan demikian, hubungan yang diukur dalam analisis regresi adalah pengaruh USFTA dan *special 301* terhadap *software piracy*, begitu pula pada analisis pengaruh antara IPP dan arus investasi asing. Indikator dari variabel IPP dalam analisis ini adalah IPR indeks, sedangkan indikator dari variabel arus investasi asing adalah FDI. Pengukuran analisis regresinya menjadi pengaruh IPR indeks terhadap FDI.

## 2. Pembahasan

**Tabel 1.**  
**Hasil Analisis Penelitian**

Regresi	Korelasi			Hipotesa diterima/ditolak
	Bentuk	Ukuran	Besaran	
USFTA & <i>Software piracy</i>	Negatif	Sedang	22,3%	diterima
<i>special 301 &amp; software piracy</i>	Negatif	Rendah	3,1%	ditolak
IPR indeks & FDI	Positif	Sedang	20,8%	diterima

Pada tabel di atas, berisi hasil-hasil analisis dari uji regresi dalam metode kuantitatif. Pada hasil penelitian ini, bentuk hubungan antara USFTA dan *software piracy* menunjukkan bentuk yang negatif, artinya antara USFTA dan *software piracy* memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Bentuk negatif ini menunjukkan adanya penurunan angka *software piracy* setelah penandatanganan perjanjian kerjasama perdagangan dengan Amerika Serikat dalam USFTA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penandatanganan kerjasama USFTA dapat menurunkan angka *software piracy*.

Bentuk korelasi antara *special 301* dan *software piracy* juga menunjukkan nilai yang negatif atau dengan kata lain memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Hubungan ini mengindikasikan, semakin negara tersebut dimasukkan ke dalam kategori *priority watch list*, yaitu kategori yang paling tidak menjalankan penegakan IPP dengan memadai, maka negara tersebut akan berusaha untuk semakin meningkatkan IPP di negaranya. Peningkatan

IPP ini ditunjukkan dengan penurunan angka *software piracy*. Berdasarkan analogi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengkategorian negara-negara berdasarkan ketidapatuhannya menegakan IPP dalam laporan *special 301* menurunkan angka *software piracy* di negara yang bersangkutan.

Berbeda dari kedua bentuk korelasi di atas, hubungan antara IPR indeks dan FDI memiliki bentuk yang positif. Hubungan antara IPR indeks dan FDI memiliki hubungan yang searah. Artinya, semakin negara tersebut memiliki nilai IPR indeks yang tinggi, maka angka FDI di negaranya juga semakin bertambah. Nilai IPR indeks yang semakin tinggi mengindikasikan penegakan IPP di negara tersebut semakin menguat. Dengan demikian dapat, dikatakan bahwa peningkatan penegakan IPP di suatu negara menyebabkan peningkatan nilai FDI di negara tersebut.

Selain menunjukkan bentuk korelasi, analisis ini juga menggambarkan seberapa besar pengaruh antar variabel. Gambaran tersebut dapat dilihat melalui hasil perhitungan ukuran dan besaran korelasi (lihat tabel 3.11). Ukuran korelasi didapatkan melalui hasil perhitungan koefisien korelasi. Seberapa besar kuat hubungan antar variabel dilihat dari pengklasifikasian koefisien korelasi yang dapat dilihat pada tabel 1.7. Sedangkan besarnya nilai korelasi dapat dilalui melalui nilai koefisien determinasi dalam kolom R square. Nilai tersebut kemudian di kalikan 100% agar dapat dijadikan bentuk presentase.

Berdasarkan dari hasil analisis sebelumnya, hubungan antara USFTA dan *software piracy* serta IPR indeks dan FDI memiliki korelasi yang sedang. Korelasi sedang ini di dapatkan dari nilai hasil koefisien korelasi pada pengaruh USFTA terhadap *software piracy* sebesar 0,472 dan nilai koefisien korelasi pada pengaruh IPR indeks terhadap FDI yaitu sebesar 0,456. Kedua nilai koefisien korelasi tersebut berada dalam interval nilai antara 0,400-0,599, sehingga hubungan kedua regresi tersebut diklasifikasikan kedalam ukuran korelasi sedang.

Selanjutnya, ukuran korelasi antar variabel diatas juga diinterpretasikan dalam bentuk besaran presentasi. Pada hubungan pengaruh antara USFTA terhadap *software piracy*, didapatkan nilai pengaruh sebesar 22,3%. Nilai pengaruh tersebut dapat diartikan bahwa USFTA berpengaruh terhadap penurunan angka *software piracy* sebesar 22,3 %. Demikian pula dengan pengaruh IPR indeks terhadap FDI. Nilai pengaruh antar variabel adalah sebesar 20,3%. Besaran nilai tersebut menunjukkan pengaruh IPR indeks dalam meningkatkan FDI sebesar 20,3%.

Pada hubungan korelasi pengaruh *special 301* terhadap *software piracy* memiliki hasil yang berbeda dari hubungan-hubungan diatas. Nilai koefisien korelasi untuk mengukur besarnya pengaruh *special 301* terhadap *software piracy* adalah sebesar 0,175. Hasil nilai koefisien korelasi ini berada pada interval 0,100-0,199, sehingga nilai ini masuk kedalam klasifikasi korelasi hubungan yang sangat rendah. Besarnya presentasi pengaruh adalah sebesar 3,1 %, artinya *special 301* mempengaruhi penurunan angka *software piracy* hanya sebesar 3,1 %, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hasil nilai korelasi pada pengaruh *special 301* terhadap *software piracy* terbilang sangat kecil jika di bandingkan dengan dua hubungan sebelumnya yaitu pengaruh USFTA terhadap *software piracy* dan IPR indeks terhadap FDI.

Selanjutnya, untuk menentukan keterbuktian hipotesa yang sebelumnya sudah di dijelaskan pada bab 1, dapat dilihat melalui hasil dari uji t. Jika nilai hasil uji t lebih dari nilai tabel t, maka hipotesa dari regresi tersebut diterima. Namun sebaliknya, jika nilai hasil uji t lebih kecil dari nilai t, maka hipotesa di tolak. Nilai tabel t yang disesuaikan dengan

*degree of freedom* (df) dengan signifikansi 5 persen (0,05). Untuk memperoleh df digunakan perhitungan  $df = n - 2$ , n adalah jumlah data yang digunakan.

Pada analisis pengaruh USFTA dan *special 301* terhadap *software piracy*, menggunakan tahun 2005-2013 dan 14 negara, sehingga didapatkan jumlah data sebanyak 104. Dengan demikian nilai df adalah sebesar 102, dengan ketentuan nilai t yaitu 1,9835. Dalam hal ini, nilai uji t pengaruh USFTA terhadap *software piracy* adalah sebesar 5,404. Angka ini jauh lebih besar dari 1,9835 yang merupakan ketentuan nilai t. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa USFTA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan *software piracy*.

Namun, lain halnya dengan yang terjadi pada pengaruh *special 301* terhadap *software piracy*. Hasil uji pada regresi ini menunjukkan nilai sebesar 1,798. Nilai ini lebih kecil dari ketentuan nilai tabel t yaitu sebesar 1,9835. Hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara laporan *special 301* terhadap penurunan angka *software piracy*. Dengan kata lain, hipotesa bahwa *special 301* berpengaruh terhadap *software piracy* ditolak.

Analisis pengaruh IPR indeks terhadap peningkatan FDI menggunakan tahun 2008-2014, sehingga didapatkan jumlah data sebanyak 77. Nilai df dengan data tersebut menjadi sebesar 1,6605. Sementara itu nilai hasil uji t pada pengaruh IPR indeks terhadap FDI adalah sebesar 4,024. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan ketentuan nilai pada tabel t yang hanya sebesar 1,6605. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa hipotesa diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara kenaikan IPR indeks terhadap kenaikan nilai FDI.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesa pada penelitian ini yaitu, adanya pengaruh antara USFTA terhadap penurunan *software piracy* dan pengaruh IPR indeks terhadap meningkatnya FDI asing adalah terbukti. Namun, hipotesa pengaruh antara laporan *Special 301* terhadap penurunan angka *software piracy* di negara-negara partner USFTA tidak terbukti.

### ***Perbandingan pengaruh kerjasama dan koersi terhadap IPP***

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan di atas, maka hasil hipotesa bahwa USFTA berpengaruh terhadap penurunan *software piracy* diterima. USFTA merupakan indikator dari variabel kerjasama, sedangkan *software piracy* merupakan indikator dari IPP. Dengan kata lain, dapat diartikan pula bahwa kerjasama berpengaruh terhadap peningkatan IPP di negara-negara partner USFTA. Hasil hipotesa tersebut sejalan dengan teori kerjasama dalam paradigma neoliberalisme yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kerjasama merupakan alat untuk mencapai kepentingan suatu negara. Neoliberal menyetujui bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingannya masing-masing, namun di sisi lain neoliberal meyakini terciptanya suatu kerjasama (Mingst 2003:64). Kepentingan akan lebih mudah dicapai dalam sebuah kerjasama. Dalam hal ini penegakan IPP yang kuat dalam tatanan global merupakan suatu wujud kepentingan Amerika Serikat.

Guna mewujudkan kepentingannya tersebut Amerika Serikat meningkatkan standar ketentuan terkait IPP disebut sebagai TRIPs-Plus. Ketentuan TRIPs-Plus ini kemudian dimasukkan ke dalam salah satu ketentuan dalam perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara-negara, baik secara bilateral maupun regional. Hipotesa dalam penelitian ini membuktikan bahwa upaya kerjasama Amerika Serikat berhasil meningkatkan penegakan IPP di negara-negara partner USFTA. Peningkatan penegakan IPP ditunjukkan melalui penurunan angka *software piracy* setelah melakukan penandatanganan perjanjian USFTA. Penurunan angka *software piracy* mengindikasikan

bahwa negara tersebut menerapkan ketentuan-ketentuan TRIPs-Plus tidak hanya pada hukum negaranya saja, namun juga dalam praktek pengimplementasiannya.

Berbeda dengan hubungan antara kerjasama dan peningkatan IPP, analisis hubungan antara koersi dan peningkatan IPP menghasilkan nilai yang tidak signifikan. Dengan kata lain, hipotesa pengaruh koersi terhadap peningkatan IPP tidak terbukti. Pengaruh laporan special 301 terhadap penurunan angka *software piracy* hanyalah sebesar 3, 1%. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa angka pengaruh ini tergolong memiliki hubungan yang sangat rendah. Hasil hipotesa ini tentu saja berbeda dari teori yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa adanya negara yang memegang hegemoni akan menjaga perilaku negara dari terjadinya pembelotan dari suatu rezim. Dalam hal ini special 301 merupakan salah satu upaya Amerika Serikat dalam menegakan IPP di negara-negara melalui bentuk koersi. Amerika Serikat melalui Special 301, memberikan ancaman sanksi perdagangan yang merupakan bentuk dari koersi dalam menegakan IPP (McIlroy, 1998: 446).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesa pada penelitian ini yaitu, adanya pengaruh antara USFTA terhadap penurunan *software piracy* dan pengaruh IPR indeks terhadap meningkatnya FDI asing adalah terbukti. Namun, hipotesa pengaruh antara laporan *Special 301* terhadap penurunan angka *software piracy* di negara-negara partner USFTA tidak terbukti.

### ***Keuntungan negara dari penegakan rezim IPP yang kuat***

Keikutsertaan negara dalam sebuah kerjasama merupakan bentuk *rational choice*-nya, artinya negara sudah memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang ia dapatkan dalam menjalin suatu kerjasama. Negara pada dasarnya berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang absolut dalam sebuah kerjasama. Dalam hal ini, negara-negara partner USFTA juga berusaha untuk mendapatkan keuntungan dalam kerjasama ini. Upaya peningkatan penegakan IPP dalam perjanjian USFTA ini memberikan keuntungan bagi perekonomian negara-negara USFTA, salah satunya melalui peningkatan arus investasi asing. Perusahaan yang menciptakan IP cenderung untuk melakukan investasi asing di negara-negara yang memiliki penegakan IPP yang kuat berinvestasi (Dunning, 1981 dalam Braga dan Fink, 1998) Hal ini dikarenakan negara dengan penegakan IPP yang lemah cenderung akan melakukan imitasi yang mengancam keuntungan kepemilikan MNE.

Selain itu, penegakan IPP yang kuat oleh *host country* juga dapat diartikan sebagai keunggulan lokasi investasi. Hal ini dikarenakan perlindungan terhadap IPR adalah hukum yang berada dalam hukum nasional. Sehingga semakin hukum negara *host countries* terkait perlindungan terhadap IPR semakin kuat, maka negara tersebut akan semakin melindungi kepemilikan aset yang dimiliki MNE. Hal ini lah yang membentuk keterkaitan antara penegakan IPP dengan masuknya arus investasi asing. Dengan kata lain, negara dengan perlindungan IPP yang lemah, memiliki daya tarik yang kecil untuk menarik MNE melakukan investasi di negaranya (Braga dan Fink, 1998). Begitu pula sebaliknya, negara dengan perlindungan IPP yang kuat memiliki daya tarik yang lebih besar untuk menarik masuknya investasi asing di negaranya.

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini menemukan bahwa, IPR indeks mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan FDI. IPR indeks menyumbang 20,8 % pada kenaikan nilai FDI. IPR indeks merupakan indikator untuk mengukur kuat atau lemahnya penegakan IPP di negara-negara partner USFTA, sedangkan FDI merupakan indikator dalam mengukur masuknya arus investasi asing. Hasil penelitian ini juga

menemukan bahwa bentuk korelasi antara peningkatan IPP terhadap arus investasi asing adalah positif. Artinya, dapat disimpulkan bahwa semakin negara tersebut meningkatkan penegakan terhadap IPP, maka arus investasi asing yang masuk ke negaranya juga semakin meningkat.

### 3. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari kedua upaya tersebut, kerjasama lebih berpengaruh dalam meningkatkan penegakan IPP di suatu negara dibandingkan dengan penggunaan koersi. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan seberapa besar pengaruh antara kerjasama dan koersi dalam meningkatkan IPP di negara-negara. Hasilnya adalah USFTA mempengaruhi penurunan angka *software piracy* sebesar 22,3%, sedangkan special 301 hanya berpengaruh sebesar 3,1%. Dalam kasus ini, penggunaan media kerjasama dalam kerangka perjanjian perdagangan USFTA lebih memfasilitasi Amerika Serikat dalam mencapai kepentingannya untuk menegakan IPP di negara-negara partner dagangnya. Sementara itu, upaya koersi melalui Special 301 hanya membuat negara menegakkan IPP dalam hukum negaranya saja namun tidak dalam pengimplementasiannya.

Penelitian pada skripsi ini menunjukkan adanya keuntungan yang didapatkan oleh negara-negara partner USFTA dari peningkatan IPP di negara-negaranya, meskipun peningkatan standar ketentuan mengenai IPP nyatanya dapat memberikan permasalahan baru misalnya dalam penyediaan akses terhadap obat-obatan, seperti yang terjadi pada Republik Dominika. Penelitian ini menemukan keuntungan yang didapatkan negara-negara partner US dari pengakan rezim IPP yang kuat. Peningkatan penegakan IPP di negara-negara partner USFTA semakin meningkatkan masuknya arus investasi asing di negara tersebut. Hal ini dibuktikan dari hasil uji statistik pada penelitian ini yang menunjukkan pengaruh yang signifikan antara IPR indeks dan peningkatan FDI. IPR indeks memberikan pengaruh sebesar 20,8% terhadap peningkatan FDI.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa upaya kerjasama memfasilitasi kepentingan Amerika Serikat dalam meningkatkan penegakan IPP di negara-negara partner dagangnya. Selain itu, upaya peningkatan IPP melalui USFTA memberikan keuntungan bukan hanya bagi Amerika Serikat, namun juga bagi negara-negara partner USFTA. Meskipun memberikan dampak buruk akibat susah akses terhadap obat-obatan, namun negara mendapatkan keuntungan yang lebih dari masuknya investasi asing.

### Daftar Pustaka

- IIPA. (2000). International Intellectual Property Alliance 2000 Special 301 Report. ([www.iipa.com](http://www.iipa.com)). Diakses pada 20 Maret 2015
- USTR (2000). Free Trade Agreement. ([www.ustr.gov](http://www.ustr.gov)). Diakses pada 3 April 2015
- Turk, Matthew (2002). Bargaining and Intellectual Property Treaties : the case for a pro-development interpretation of TRIPS but not TRIPS Plus. *International Law and Politics Vol.42.981*. pp: 981-1028
- Lesser, W. (2002). The Effects of intellectual property rights on foreign direct investment and imports in developing countries. *IP Strategy Today No. 4*.pp: 1-16.
- Lippoldt, D. (2006). Intellectual property rights, pharmaceuticals and foreign direct investment. *Group d'Economie Mondiale de Sciences Po. Policy Brief*
- Lindstrom, Beatrice (2010). Scaling Back TRIPs-Plus: An Analysis of Intellectual Property Provisions in Trade Agreement and Implications for Asia and The Pasific. *International Law and Politics Vol.42.917*. pp: 918-978

- Sell, Susan K. (2003). *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*. London: Cambridge University Press
- Castro, Rosa Bernieri (2009). Compulsory Licensing and Public Health: TRIPs-Plus Standards in Investment Agreement. TDM. pp:1-30
- Adams, Samuel.(2010). Intellectual Property Rights, Investment Climate and FDI in Developing Countries. *International Business Research Vol. 3, No. 3*. pp:201-209
- Smarzynska, B. J. (2004). The composition of foreign direct investment and protection of intellectual property rights: evidence from transition economies.*European Economic Review*,48.pp:39-62.
- Mingst, Karen A (2003). *Essentials of International Relation 2nd Edition*. New York: W W Norton & Co Inc
- McIlroy, J. (1998). American Enforcement of Intellectual Property Rights a Canadian Perspective. *The Journal of World Intellectual Property*, 1 (3),. pp.445–64.
- Braga, P. A. and Fink, C. (1998),The relationship between intellectual property rights and foreign direct investment. *Duke Journal of Comparative and International Law* 19, pp:163-187